

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Indonesia dikenal sebagai sebuah bangsa yang besar yang terdiri dari beribu-ribu pulau dari Sabang sampai ujung Merauke. Realitas ini menuntut seluruh masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk tetap menjadi bangsa yang satu dengan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah didapatkan 71 tahun sejak proklamasi dikumandangkan adalah merupakan hasil dari para perjuangan para dan pahlawan untuk bangsa ini. Para pejuang dan pendiri bangsa tidak saja hanya melepaskan bangsa ini dari penjajahan melainkan mereka menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar yang menyatukan berbagai latar belakang etnis, agama, suku, budaya, ras menjadi satu kesatuan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman dan luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah selain sebagai berkah juga disisi lain sebagai sebuah tantangan dan acaman akan tetap terjaganya kesatuan dan keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimasa yang akan datang. Masa kontemporer di abad ini ancaman mengenai disintegrasi yaitu sebuah keinginan untuk memisahkan diri dan menjadi sebuah negara sendiri hampir terjadi disetiap belahan dunia. Hal ini semakin mempertegas bahwa ancaman disintegrasi adalah sebuah tantangan serius yang harus dihadapi dengan serius oleh setiap bangsa dan negara termasuk Indonesia.

Sebagai salah satu upaya dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah menanamkan rasa dan kesadaran nasionalisme melalui pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan bukan saja hanya pendidikan yang mencakup pendidikan formal tetapi juga pendidikan secara umum termasuk pendidikan dalam dimensi sosial kultural sebagaimana diungkapkan (Winataputra, 20120).

Sebagai salah satu program pendidikan menurut winataputra menjelaskan salah satu domain sosio kultural dengan istilah *comuniti civic education* merupakan dimensi sosial kultural dalam pengembangan *smart and good citizens* untuk pembelajaran yang sangat luas dan beragam, substransi dan proses pendidikanya bersifat *contextually customized, fleksible, less structured, enculturation oriented*. Di dalam masyarakat biasa disebut *community civic*

education yang dapat dikembangkan untuk berbagai komunitas masyarakat bangsa dan Negara. misalnya untuk pejabat Negara dan birokrat (*administrasion civic education*) politisi (*Political education*) akademisi (*professional civic education*) praktisi/teknisi wartawan (*practitioner civic education*). Pejabat pada pemerintah daerah ,kelompok masyarakat (*popular civic education* (winataputra, 2012:257:258)

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya pendidikan secara umum tidak hanya pendidikan secara formal tetapi juga pendidikan dalam lingkup sosial kultural. Pendapat ini sejalan dengan pendidikan dalam ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi yang mengemban tujuan pendidikan sebagaimana diungkapkan Wahab dan Sapriya (2011:331-312)

Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam membentuk warga negara yang baik (*To be good zitizens*), Somantri (2001) melukiskan bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, ..., Pancasilais sejati". Wahab (1996) mengidentifikasi warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri dan juga masalah-masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan dengan fungsi dan perannya (*sosial sensitive, sosial responsible, and sosial intelegence*), memiliki sikap disiplin pribadi, mampu berfikir kritis, kreatif, dan inovatif agar tercapai kualitas pribadi dan perilaku warga negara dan warga masyarakat yang baik (*socio civic behaviour dan desirable personal qualities*)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan mampu memecahkan masalah yang ada dalam lingkungan masyarakat. Sejalan dengan pendapat di atas dan hubungannya dengan pendidikan kewarganegaraan menurut Rahayu (2007;21) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya pendidikan dilingkungan formal tetapi mencakup lingkungan yang lebih luas termasuk lingkungan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan non formal merupakan pendidikan di luar lingkup sekolah yang berwujud pemberdayaan masyarakat dalam hal sosial, ekonomi, politik termasuk dalam hal kesadaran nasionalisme.

Berdasarkan penjelasan diatas , Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam upaya mengembangkan masyarakat Indonesia yang tetap memiliki semangat nasionalisme yang tinggi dalam menghadapi tantangan global

dan etnisitas. Lebih lanjut secara khusus dikemukakan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 37, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi. Ketentuan ini dijelaskan lagi pada bagian penjelasan dari Undang-Undang tersebut bahwa "Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan penting dalam membina semangat nasionalisme Indonesia dalam wujud semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Pertimbangan kedudukan dan urgensi pembinaan semangat nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu Litbang Kompas (2002), Triardianto dan Suhardiman (2002:321, Fajar (2003:137), Komalasari (2007:561-562), Erari (2009), dan Anggraeni (2009) yang menunjukkan bahwa nasionalisme bangsa Indonesia perlu mendapat pembinaan yang berkesinambungan guna menghadapi berbagai tantangan dewasa ini.

Selanjutnya karena pentingnya permasalahan nasionalisme, dewasa ini nasionalisme menjadi signifikan untuk diperbincangkan karena pada kenyataannya, dalam sebuah negara banyak terdapat berbagai kelompok yang berbeda. Perbedaan yang dimaksud tentu dalam berbagai aspek tetapi yang paling utama sekaligus sensitif adalah beragamannya suku dan agama. Maka dengan demikian nasionalisme dipandang sebagai kekuatan perekat agar negara tidak bercerai berai. Bangsa dan negara merupakan kesatuan komunitas masyarakat pluralis yang di dalamnya terdapat berbagai macam unsur yang saling melengkapi yang diatur dalam sebuah sistem dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Nasionalisme tidak dibatasi oleh suku, bahasa, agama, daerah dan strata sosial. nasionalisme memberi tempat segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup.

Kemajemukan masyarakat bukanlah penghalang untuk mewujudkan suatu tujuan dan cita-cita dalam hidup bernegara ketika nasionalisme dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan yang pluralis. Dengan kata lain bahwa melalui nasionalisme masyarakat yang serba pluralis dapat bersatu padu dalam bingkai

persamaan hak dan demokratisasi. Hal ini sejalan dengan penjabaran Ruslan Abdul Gani tentang nasionalisme yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Perikemanusiaan yang berorientasi internasionalisme, ber-Persatuan Indonesia yang patriotik, ber-Kerakyatan atau demokrasi serta berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat.

Realitas dalam perkembangan perjalanan bangsa sebagaimana yang diuraikan diatas pasca reformasi bertolak belakang dengan kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya *civic nationalism* bangsa sehingga mengakibatkan suburnya semangat *ethno-nationalism* yang di masyarakat. *Ethno-nationalism* adalah bentuk nasionalisme yang berbasis identitas-identitas primordial seperti etnis, suku, dan ras. Akan tetapi dalam pengertian lebih luas, *ethno-nationalism* didefinisikan sebagai doktrin yang melekat pada suatu kelompok masyarakat yang merasa memiliki perbedaan budaya, sejarah, maupun prinsip-prinsip hidup tersendiri sehingga mereka merasa perlu memiliki sebuah pemerintahan sendiri di luar pemerintahan yang sah. *Ethno-nationalisme* dapat pula dipahami sebagai bentuk hilangnya loyalitas dari suatu kelompok masyarakat tertentu terhadap sebuah ikatan yang lebih besar, yakni bangsa dan Negara Indonesia. Jika fenomena *ethno-nationalism* berlangsung dalam jangka waktu lama, bukan mustahil bila riwayat Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berujung pada disintegrasi sebagaimana yang pernah dialami Uni Soviet.

Selanjutnya kembali kepada persoalan *ethno-nasionalisme* sebagai paham yang berkontradiktif dengan semangat nasionalisme abad globalisasi ini melahirkan organisasi-organisasi yang sifatnya transnasional salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia. Pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI jika dihubungkan dengan pengertian *ethno nasionalisme* yang lebih luas seperti pengertian di atas maka dapat dikategorikan sebagai organisasi yang memberikan pengaruh *ethno nasionalisme*. Hizbut Tahrir Indonesia sebagai organisasi transnasional memiliki pergerakan yang berorientasi pada konsep *Word State* yaitu negara dunia sedangkan negara Indonesia mengenal *National State* maka hal ini memungkinkan terjadinya persinggungan nilai termasuk di dalamnya nilai-nilai nasionalisme. Pergerakan dan perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia yang berasaskan ideologi agama yang memperjuangkan bangkitnya peradaban islam berupa kekhalifahan maka akan mempengaruhi

pandangan ideologi kebangsaan dan nasionalisme (*national state*) yaitu ideologi pancasila atau bahkan juga saling menguatkan antara keduanya.

Berdasarkan pertimbangan dan penjelasan yang diuraikan di atas menjadi permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji secara empirik dan ilmiah karena negara Indonesia adalah negara yang bersifat demokratis dan multikultural dan berlandaskan pada demokrasi pancasila. Dari uraian di atas, maka penulis terdorong untuk mengkaji lebih mendalam tentang masalah yang berkaitan dengan **Konsep Pemikiran Elit Politik Hizbut Tahrir terhadap Kesadaran Nasionalisme**

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka penulis akan memberikan batasan masalah melalui identifikasi masalah penelitian yang dikemukakan sebagai berikut

1. Negara Indonesia sebagai negara yang luas dan kaya raya yang terdiri dari ratusan ribu pulau dan masyarakat yang majemuk selain sebagai berkah juga mempunyai potensi adanya perpecahan dan disintegrasi.
2. Kesadaran nasionalisme menjadi sangat penting untuk semakin dikaji karena makin meningkatnya negara- negara yang baru yang terbentuk di hampir setiap belahan dunia berusaha menuntut untuk memisahkan diri dari negara asalnya. Oleh karena itu nasionalisme menjadi penting dalam upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Objek studi *civics* Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, social, ekonomi, agama, dan negara yang belum optimal diaplikasikan dalam berbagai lini kehidupan.
4. Tumbuh kembangnya organisasi transnasional memungkinkan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat tentang nasionalisme semakin menurun.
5. Lahirnya organisasi-organisasi yang mengusung negara dengan konsep *word state* maka akan berbenturan dengan hakikat Negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan *national State*

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka mencoba merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Elit Hizbut Tahrir Indonesia dalam kesadaran nasionalisme?
2. Bagaimana proses pembinaan Hizbut Tahrir Indonesia yang berpengaruh dengan kesadaran nasionalisme ?
3. Bagaimana dampak pergerakan Hizbut Tahrir terhadap pembinaan kesadaran nasionalisme?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan menggali dan mengungkapkan pandangan elit politik Hizbut Tahrir Indonesia yang dibangun melalui organisasi pergerakan sosial kemasyarakatan dalam pandangannya terhadap kesadaran nasionalisme.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mengetahui informasi tentang:

- 1) Pandangan elit politik Hizbut Tahrir Indonesia tentang rasa dan kesadaran nasionalisme kepada bangsa dan negara.
- 2) Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan elit politik hizbut tahrir sebagai wujud pemahaman terhadap rasa nasionalisme.
- 3) Mengetahui pengaruh pemikiran khilafah terhadap rasa nasionalisme dalam masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara keilmuan (teoritik) maupun secara empirik (praktis). Secara teoritik, penelitian ini akan menggali dan mengungkapkan pandangan elit politik Hizbut Tahrir Indonesia yang dibangun melalui organisasi pergerakan sosial kemasyarakatan dalam pandangannya terhadap kesadaran nasionalisme terhadap bangsa dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Dari temuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, terutama sebagaimana yang diuraikan berikut:

- 1) Para akademisi atau komunitas akademik, khususnya dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan kontribusi bagi pengembangan untuk

memperkaya pemikiran-pemikiran baru dalam menghadapi tantangan demokrasi Pancasila.

- 2) Bagi masyarakat untuk dapat mengetahui sebuah pemikiran yang kritis terhadap pemikiran yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi Pancasila.
- 3) Para pengambil kebijakan, khususnya yang terkait dengan program upaya meningkatkan kesadaran nasionalisme warga negara yang mempersatukan bangsa Indonesia dari berbagai macam, suku, agama ras, adat istiadat.

F. Struktur Organisasi Tesis

Struktur penulisan tesis yang akan ditulis terdiri dari 5 bab, yakni:

Bab I membahas pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi tesis.

Bab II membahas kajian pustaka yang meliputi; Kajian teoritis Pendidikan kewarganegaraan yang terdiri dari; Pengertian pendidikan Kewarganegaraan, sejarah pendidikan kewarganegaraan, Tujuan Pendidikan kewarganegaraan, Visi dan Misi Pendidikan kewarganegaraan, dan materi pokok pendidikan kewarganegaraan. Selain itu dalam kajian pustaka ini juga dibahas mengenai kajian teori tentang kesadaran nasionalisme warga negara Indonesia yang mencakup; konsep teoritis nasionalisme, nasionalisme dalam paradigma Pendidikan Kewarganegaraan dan pembinaan kesadaran nasionalisme warga negara Indonesia. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai organisasi Hizbut Tahrir Indonesia yang menjadi obyek dari penelitian ini yang mencakup; sejarah Hizbut Tahrir Indonesia, Konsep Khilafah sebagai dasar pergerakan Hizbut Tahrir. Selanjutnya untuk lebih menguatkan dan mempermudah telaah dalam kajian pustaka ini akan ditambahkan dengan Penelitian Terdahulu, dan kerangka pikir Penelitian.

Bab III membahas tentang metode penelitian. Adapun sub bab yang dibahas dalam bab ini mencakup desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan tahapan-tahapan dalam penelitian serta paradigma penelitian.

Bab IV membahas tentang temuan dan pembahasan. Pada bab ini dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi. Pada bab ini dibagi menjadi tiga sub bab yaitu:(1) simpulan; (2) implikasi dan (3) rekomendasi.